



KABUPATEN PANGANDARAN



RENCANA KERJA 2023

INSPEKTORAT



(0265) 2641177



inspektorat0713@gmail.com



Jl. Raya Cijulang Dusun Karangbenda
RT. 03 RW.01 Parigi 46393



Inspektorat Pangandaran



Inspektorat Pangandaran



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga **Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2023** telah dapat diselesaikan penyusunannya. Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2023, mempunyai arti strategis karena didalamnya memuat uraian program dan kegiatan, yang dirumuskan berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Inspektorat yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Inspektorat. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar sebagai upaya mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan dimana semua kebijakan, program, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Penyusunan Renja Tahun 2023 merupakan kewajiban bagi setiap Perangkat Daerah. Renja Inspektorat disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, dan strategi seluruh aparat Inspektorat Kabupaten Pangandaran dalam membina, melayani dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Inspektorat. Renja Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 memuat penjabaran program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun tersebut.

Berhasil dan tidaknya target yang telah ditentukan dalam Renja Inspektorat tidak terlepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat. Renja yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2023 untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Selain itu juga dapat berguna bagi peningkatan kinerja Inspektorat Kabupaten Pangandaran.

Pangand., 25 Juli 2022
INSPEKTUR
KABUPATEN PANGANDARAN

Drs. APIP WINAYADI
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19650514 199203 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021	12
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2021 dan Capaian Renstra Inspektorat	12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Pangandaran.....	32
2.2.1 Indikator Kinerja Nilai Sakip	32
2.2.2 Indikator “Tingkat Maturitas SPIP”	32
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat.....	36
2.3.1 Pelayanan Inspektorat.....	36
2.3.2 Permasalahan dan Hambatan dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	37
2.3.3 Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional.....	37
2.3.4 Tantangan dan Peluang Peningkatan Pelayanan Perangkat Daerah	38
2.3.5 Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2023	39
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	39
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	51
BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT KABUPATEN PANGANDARAN	56
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	56
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Inspektorat.....	57
3.3 Program dan Kegiatan.....	58
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2023.....	67
BAB V PENUTUP.....	77

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Faktor Penyebab Tidak Tercapai, Tercapai dan Capaian Melibhi Target Kinerja Program/Kegiatan Inspektorat.....	20
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Pangandara	21
Tabel 2.3	Sasaran Strategi Inspektorat	32
Tabel 2.4	Analisis Efektivitas Penggunaan Sumber Daya Tahun Anggaran 2021	33
Tabel 2.5	Analisis Efektivitas Penggunaan Sumber Daya Tahun Anggaran 2021	34
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Pangandaran	35
Tabel 2.7	Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 Kabupaten Pangandaran.....	40
Tabel 2.8	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Pangandaran	51
Tabel 3.1	Korelasi Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Pangandaran.....	57
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Inspektorat Tahun 2023	58
Tabel 3.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Pangandaran	59
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan pada tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Renstra. Dokumen Renja Inspektorat merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah baik yang langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Inspektorat memuat perencanaan tahunan dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas dan sasaran penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah.

Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Renja. Renja merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh karena itu setiap Perangkat Daerah harus merumuskan Renja secara transparan, responsif, efisiensi, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Renja Inspektorat 2023 disusun berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan sistematika penyusunannya berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja Inspektorat ini disusun dengan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Inspektorat sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Pangandaran memuat program, kegiatan, alokasi dan kelompok saran dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan tahapan penyusunan berupa persiapan penyusunan Renja; persiapan

Rancangan Awal Renja Inspektorat yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Inspektorat tahun lalu dan evaluasi hasil Inspektorat tahun berjalan; penyusunan Rancangan Renja Inspektorat; pembahasan Rancangan Renja Inspektorat; perumusan Rancangan Akhir Renja Inspektorat; Verifikasi Rancangan Akhir Renja Inspektorat.

Renja Inspektorat Tahun 2023 merupakan dokumen Perencanaan Kinerja Inspektorat untuk tahun Ke tiga periode Renstra Inspektorat 2021-2026 yang menjadi pedoman penyusunan Renja dan Anggaran Inspektorat Tahun 2023 dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target Renstra dan RPJMD yang diselaraskan dengan pencapaian dan sasaran pembangunan nasional. Selain itu, penyusunan Renja Inspektorat mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran tahun 2023, Renstra Inspektorat, Renja K/L dan Renja Provinsi Jawa Barat. Renja harus selaras dengan dokumen-dokumen perencanaan tersebut, utamanya yang berkaitan langsung dengan urusan Inspektorat.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 berdasarkan pada beberapa peraturan sebagai landasan atau rujukan, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
30. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 9 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252) sebagaimana telah mengubah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
35. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 79);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025

- (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4);
 41. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
 42. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70);
 43. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 48);
 44. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 55 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 55).

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Inspektorat adalah dokumen perencanaan untuk 1 (satu) tahun yang mengacu pada Renstra Inspektorat dengan periode 5 (lima) tahun dengan maksud memberikan arah sekaligus sebagai acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara umum dilingkup Inspektorat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Maksud disusunnya Renja Inspektorat Kabupaten Pangandaran 2023 adalah untuk dijadikan dasar serta acuan bagi Penyusunan Program dan Kegiatan Tahunan, serta guna mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renja Inspektorat adalah:

- a. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 (satu) tahun yang tersusun dalam rencana;
- b. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun oleh Inspektorat;
- c. Sebagai pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
- d. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah/kebijakan sesuai dengan kewenangannya;
- e. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika dokumen Renja Inspektorat Kabupaten Pangandaran tahun 2023 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Inspektorat, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Inspektorat, proses penyusunan Renja Inspektorat, keterkaitan antara Renja Inspektorat dengan dokumen RKPD, Renstra Inspektorat, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Inspektorat.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Inspektorat, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2021 dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Pangandaran

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat tahun 2021.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Pangandaran

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Inspektorat berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Pangandaran

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Inspektorat dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Inspektorat, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Inspektorat, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*), tantangan dan peluang dalam

meningkatkan pelayanan Inspektorat, dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program atau kegiatan yang diusulkan para stakeholders yang terkait langsung dengan pelayanan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT KABUPATEN PANGANDARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya, tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT KABUPATEN PANGANDARAN

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus berorientasi kepada kepentingan masyarakat.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2021

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu ditunjukkan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD, serta hambatan permasalahan yang dihadapi. Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja OPD terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara pemerintah dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Kewenangan, uraian tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Pangandaran sesuai dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat. Adapun tiap urusan dijabarkan kembali dengan program dan kegiatan yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2021 dan Capaian Renstra Inspektorat

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan dan untuk bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu lagi untuk direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Inspektorat tahun lalu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan Renja pada tahun tersebut. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat disusun berdasarkan analisis kondisi objektif permasalahan yang timbul. Dari permasalahan tersebut yang kemudian disusunlah suatu program dan kegiatan pada tahun selanjutnya yakni Tahun 2023.

Sebagaimana termaktub dalam sistematika Renja Perangkat Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa perlu dilakukannya evaluasi pelaksanaan

dan capaian Renja tahun lalu. Evaluasi terhadap Renja Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan. Penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

- a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.

Dari hasil evaluasi Program/Kegiatan Pada Tahun 2021, ada beberapa kegiatan yang direncanakan namun tidak dapat dilaksanakan karena mengalami rasionalisasi anggaran, antara lain : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dilaksanakan melalui kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dilaksanakan melalui sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan capaian kinerja sebanyak 0 Jenis atau Capaiannya sebesar 0,00 % dari target yang ditetapkan sebanyak 8 Jenis Pelaksanaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.0,00 atau Capaiannya sebesar 0,00 % dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.3.100.000,00;

Adapun program dan kegiatan Inspektorat Dari hasil evaluasi yang tidak melebihi target kinerja yang telah direncanakan adalah sebagai berikut:

- I. Program Penyelenggaraan Pengawasan, dilaksanakan melalui kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, dilaksanakan melalui sub kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, dengan capaian kinerja sebanyak 3 Laporan atau Capaiannya sebesar 75 % dari target yang ditetapkan sebanyak 4 Laporan Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.214.514.040,00 atau Capaiannya sebesar 59,24 % dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.362.122.500,00;
- II. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dilaksanakan melalui kegiatan :
 - II.1 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dilaksanakan melalui sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan capaian kinerja sebanyak 25 Orang atau Capaiannya sebesar 78,13 % dari target yang ditetapkan sebanyak 32 Orang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan penyerapan anggaran sebesar

Rp.91.890.000,00 atau Capaiannya sebesar 56,72 % dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.162.000.000,00;

II.2 Administrasi Umum Perangkat Daerah, dilaksanakan melalui sub kegiatan :

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan capaian kinerja sebanyak 32 Jenis atau Capaiannya sebesar 84,21 % dari target yang ditetapkan sebanyak 38 Jenis Pelaksanaan Koordinasi dan Pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.62.790.325,00 atau Capaiannya sebesar 93,72 % dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.66.999.072,00;
2. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan capaian kinerja sebanyak 23 Laporan atau Capaiannya sebesar 92 % dari target yang ditetapkan sebanyak 25 Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.37.363.970,00 atau Capaiannya sebesar 54,14 % dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.69.009.000,00;

II.3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dilaksanakan melalui sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan capaian kinerja sebanyak 89 Buah atau Capaiannya sebesar 77,39 % dari target yang ditetapkan sebanyak 225 Buah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.953.000,00 atau Capaiannya sebesar 68,07 % dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.1.400.000,00;

II.4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dilaksanakan melalui sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan capaian kinerja sebanyak 16 Unit atau Capaiannya sebesar 80 % dari target yang ditetapkan sebanyak 20 Unit Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.3.371.200,00 atau Capaiannya sebesar 100 % dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.15.000.000,00;

Beberapa program dan kegiatan Inspektorat diatas tidak dapat mencapai target yang dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Belum optimalnya jumlah aparaturnya pengawasan;
2. Belum optimalnya anggaran untuk pengawasan;
3. Belum optimalnya sarana dan prasarana pengawasan.

Adapun program dan kegiatan Inspektorat Dari hasil evaluasi yang telah mencapai target kinerja yang telah direncanakan adalah sebagai berikut:

I. Program Penyelenggaraan Pengawasan, dilaksanakan melalui kegiatan :

I.1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal, dilaksanakan melalui sub kegiatan :

1. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan capaian kinerja sebanyak 8 Laporan atau Capaiannya sebesar 100 % dari target yang ditetapkan sebanyak 8 Laporan Pelaksanaan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.54.849.000,00 atau Capaiannya sebesar 24,75 % dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.221.646.500,00;
2. Reviu Laporan Kinerja, dengan capaian kinerja sebanyak 2 Laporan atau Capaiannya sebesar 100 % dari target yang ditetapkan sebanyak 2 Laporan Pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.24.955.000,00 atau Capaiannya sebesar 45,70% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.54.605.000.500,00;
3. Reviu Laporan Keuangan, dengan capaian kinerja sebanyak 2 Laporan atau Capaiannya sebesar 100 % dari target yang ditetapkan sebanyak 2 Laporan Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.31.306.000,00 atau Capaiannya sebesar 100 % dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.31.306.000,00;
4. Pengawasan Desa, dengan capaian kinerja sebanyak 2 Laporan atau Capaiannya sebesar 100 % dari target yang ditetapkan sebanyak 2 Laporan Pelaksanaan Pengawasan Desa, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.214.514.040,00 atau Capaiannya sebesar 99,94 % dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.260.550.000,00;
5. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP, dengan capaian kinerja sebanyak 12 Laporan atau Capaiannya sebesar 100 % dari target yang ditetapkan sebanyak 12 Laporan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.3.912.096,00 atau Capaiannya sebesar 1,50% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.259.948.000,00;

I.2 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, dilaksanakan melalui sub Kegiatan :

1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, dengan capaian kinerja sebanyak 10 Laporan atau Capaiannya sebesar 100 % dari target yang ditetapkan sebanyak 10 Laporan Pelaksanaan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.71.807.500,00 atau Capaiannya sebesar 42,80 % dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.167.760.000,00;
 2. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu, dengan capaian kinerja sebanyak 16 Laporan atau Capaiannya sebesar 100 % dari target yang ditetapkan sebanyak 16 Laporan Pelaksana Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.131.206.500,00 atau Capaiannya sebesar 20,72 % dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.633.283.000,00;
- II. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, dilaksanakan melalui kegiatan :
- II.1 Pendampingan dan Asistensi, dilaksanakan melalui sub kegiatan :
1. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi, dengan capaian kinerja sebanyak 1 Laporan atau Capaiannya sebesar 100 % dari target yang ditetapkan sebanyak 1 Laporan Pelaksanaan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.33.790.000,00 atau Capaiannya sebesar 43,56 % dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.77.565.000,00;
 2. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dengan capaian kinerja sebanyak 12 Laporan atau Capaiannya sebesar 100 % dari target yang ditetapkan sebanyak 12 Laporan Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.2.113.400,00 atau Capaiannya sebesar 3,04 % dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.69.624.000,00;
 3. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas, dengan capaian kinerja sebanyak 1 Laporan atau Capaiannya Sebesar 100 % dari target yang ditetapkan sebanyak 1 Laporan Pelaksanaan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.511.725.000,00 atau Capaiannya sebesar 87,38 % dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.585.648.000,00;

III. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dilaksanakan melalui kegiatan :

III.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dilaksanakan melalui sub kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan capaian kinerja sebanyak 14 Dokumen atau Capaiannya sebesar 100 % dari target yang ditetapkan sebanyak 14 Dokumen Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.22.048.900,00 atau Capaiannya sebesar 86,30 % dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.25.550.000,00;
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan capaian kinerja sebanyak 1 Dokumen atau Capaiannya sebesar 100 % dari target yang ditetapkan sebanyak 1 Dokumen Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.270.000,00 atau Capaiannya sebesar 15,81 % dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.1.707.500,00;

III.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dilaksanakan melalui sub kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan capaian kinerja sebanyak 35 Orang atau Capaiannya sebesar 100 % dari target yang ditetapkan sebanyak 35 Orang Pelaksanaan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.3.950.179.406,00 atau Capaiannya sebesar 86,30 % dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.4.302.740.452,00;
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan capaian kinerja sebanyak 69 Dokumen atau Capaiannya sebesar 100 % dari target yang ditetapkan sebanyak 69 Dokumen Pelaksanaan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.21.000.000,00 atau Capaiannya sebesar 100 % dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.21.000.000,00;

III.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dilaksanakan melalui sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan capaian kinerja sebanyak 362 Unit atau Capaiannya sebesar 100 % dari target yang ditetapkan sebanyak 362 Unit Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.21.000.000,00 atau Capaiannya sebesar 100 % dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.21.000.000,00;

- III.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dilaksanakan melalui sub kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian, dengan capaian kinerja sebanyak 12 Laporan atau Capaiannya sebesar 100 % dari target yang ditetapkan sebanyak 12 Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.17.400.000,00 atau Capaiannya sebesar 100 % dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.17.400.000,00;
- III.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah, dilaksanakan melalui sub kegiatan :
1. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan capaian kinerja sebanyak 2 Jenis atau Capaiannya sebesar 100 % dari target yang ditetapkan sebanyak 2 Jenis Pelaksanaan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.3.127.012,00 atau Capaiannya sebesar 30,97 % dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.10.097.400,00;
 2. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, dengan capaian kinerja sebanyak 1 Sistem atau Capaiannya sebesar 100 % dari target yang ditetapkan sebanyak 1 Sistem Pelaksanaan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.17.400.000,00 atau Capaiannya sebesar 100 % dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.17.400.000,00;
- III.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dilaksanakan melalui sub kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan capaian kinerja sebanyak 1 Unit atau Capaiannya sebesar 100 % dari target yang ditetapkan sebanyak 1 Unit Pelaksanaan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 atau Capaiannya sebesar 100 % dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.150.000.000,00;
- III.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dilaksanakan melalui sub kegiatan :
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan capaian kinerja sebanyak 4 Rekening atau Capaiannya sebesar 100 % dari target yang ditetapkan sebanyak 4 rekening Pelaksanaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 491.902.81,00 atau Capaiannya sebesar 69,48% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.70.800.000,00;
 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan capaian kinerja sebanyak 5 Orang/Bulan atau Capaiannya sebesar 100 % dari target yang ditetapkan sebanyak 5 Orang/Bulan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan

penyerapan anggaran sebesar Rp.95.403.080,00 atau Capaiannya sebesar 77,90 % dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.122.471.112,00;

III.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dilaksanakan melalui sub kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan capaian kinerja sebanyak 1 Unit atau Capaiannya sebesar 100 % dari target yang ditetapkan sebanyak 1 Unit Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.22.205.740,00 atau Capaiannya sebesar 52,27 % dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.42.485.056,00;
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan capaian kinerja sebanyak 12 Unit atau Capaiannya sebesar 100 % dari target yang ditetapkan sebanyak 12 Unit Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.20.622.300,00 atau Capaiannya sebesar 14,47 % dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.142.521.478,00;
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan capaian kinerja sebanyak 1 Unit atau Capaiannya sebesar 100 % dari target yang ditetapkan sebanyak 1 Unit Pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.300.000,00 atau Capaiannya sebesar 100 % dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.300.000,00;

Beberapa program dan kegiatan Inspektorat diatas dapat mencapai target yang dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Adanya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan;
2. Adanya SOP pengawasan;
3. Adanya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
4. Motivasi kerja pegawai cukup tinggi;

Adapun program dan kegiatan Inspektorat Dari hasil evaluasi yang telah melebihi capaian target kinerja yang telah direncanakan adalah sebagai berikut: Program Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dilaksanakan melalui kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dilaksanakan melalui sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan capaian kinerja sebanyak 1074 Eksplar atau Capaiannya sebesar 107,40 % dari target yang ditetapkan sebanyak 1000 Eksplar Pelaksanaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.8.820.000,00 atau Capaiannya sebesar 70 % dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.12.600.000,00;

Beberapa program dan kegiatan Inspektorat diatas yang capaiannya melebihi target dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut : Adanya Pandemi Covid -19 sehingga terjadinya Refocusing anggaran sehingga penyerapan anggaran tidak tercapai akan tetapi selalu Ada informasi -informasi perundang-undangan baru dari Provinsi maupun Pusat sehingga realisasi dokumen melebihi target yang ingin di capai.

Tabel 2.1
Faktor Penyebab Tidak Tercapai, Tercapai dan Capaian Melibihi Target Kinerja Program/Kegiatan Inspektorat

No	Faktor Capaian Program/Kegiatan Tidak Sesuai Target	Faktor Capaian Program/Kegiatan Sesuai Target	Faktor Capaian Program/Kegiatan Melebihi Target	Solusi yang dilakukan
1.	Belum optimalnya jumlah aparatur pengawasan;	Adanya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan;	Ada informasi -informasi perundang-undangan baru dari Provinsi maupun Pusat sehingga realisasi dokumen melebihi target yang ingin di capai	Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur pengawasan;
2.	Belum optimalnya anggaran untuk pengawasan;	Adanya SOP pengawasan;		Optimalisasi pelaksanaan pemeriksaan dengan memperhatikan kualitas hasil pemeriksaan;
3.	Belum optimalnya sarana dan prasarana pengawasan.	Adanya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);		Manajemen waktu dalam memproses dan menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
4.		Motivasi kerja pegawai cukup tinggi;		Implementasi budaya kerja yang telah ditetapkan secara konsisten;
5.				Mengoptimalkan sarana dan prasarana pengawasan;
6.				Pendekatan dan pembinaan terhadap objek pemeriksaan;
7.				Manajemen Pengawasan Berbasis Resiko.

Sumber:

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Inspektorat tahun lalu dan capaian Renstra Inspektorat yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Pangandaran

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Juni tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase Laporan Keuangan dengan Kualitas Baik 3. Persentase Peningkatan Kompetensi Aparatur 4. Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang berkualitas	90 %	90 %	90 %	90 %	100%	90 %	45 %	50%
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu 2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu 3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	90 %	90 %	90 %	90 %	100%	90 %	45 %	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (2022))		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Juni tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
I.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	100%	14 Dokumen	14 Dokumen	10 Dokumen	71%
I.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12 Laporan	12 Laporan	-	-	0%	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0%
I.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12 Laporan	12 Laporan	-	-	0%	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0%
I.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	12 Laporan	12 Laporan	-	-	0%	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0%
I.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	12 Laporan	12 Laporan	-	-	0%	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0%
I.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	15 Laporan	15 Laporan	6 Laporan	40%

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (2022))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun berjalan (Juni tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
I.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	-	Laporan	0%	0 Laporan	0 Laporan	0%
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja yang Menyusun Laporan Kinerja Keuangan dengan baik	90 %	90 %	90 %	90 %	100%	90 %	45 %	50%
I.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang	33 Orang	32 Orang	32 Orang	100%	40 Orang	40 Orang	100%
I.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	69 Dokumen	69 Dokumen	69 Dokumen	69 Dokumen	100%	28 Dokumen	16 Dokumen	57%
I.2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	-	Laporan	0%	0 Laporan	0 Laporan	0%
I.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	4 Dokumen	1 Dokumen	25%
I.2.5	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah bahan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	4 Dokumen	4 Dokumen	-	Dokumen	0%	0 Dokumen	0 Dokumen	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (2022))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Juni tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
I.2.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	12 Dokumen	0 Dokumen	0%
I.2.7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan dan analisis prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	12 Laporan	12 Laporan	- Laporan	- Laporan	0%	1 Laporan	0 Laporan	0%
I.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	273 Unit	273 Unit	273 Unit	273 Unit	100%	273 Unit	273 Unit	100%
I.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan	- Laporan	- Laporan	0%	0 Laporan	0 Laporan	0%
I.3.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100 Dokumen	- Dokumen	- Dokumen	- Dokumen	0%	0 Dokumen	0 Dokumen	0%
I.3.3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	12 Laporan	12 Laporan	- Laporan	- Laporan	0%	0 Laporan	0 Laporan	0%
I.3.4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan	12 Laporan	12 Laporan	- Laporan	- Laporan	0%	0 Laporan	0 Laporan	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Juni tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
I.3.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	-	-	0%	0 Laporan	0 Laporan	0%
I.3.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	362 Unit	362 Unit	6 Laporan	6 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	50%
I.3.7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang digunakan	316 Unit	- Unit	-	-	0%	1 Unit	0 Unit	0%
I.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	90 %	n.a %	90 %	90 %	100%	90 %	45 %	50%
I.4.1	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	50%
I.4.2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Laporan	2 Laporan	-	-	0%	0 Laporan	0 Laporan	0%
I.4.3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	31 Orang	31 Orang	32 Orang	32 Orang	100%	40 Orang	17 Orang	43%
I.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	90 %	n.a %	90 %	90 %	100%	90 %	45 %	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun berjalan (Juni tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
I.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Jenis	5 Jenis	8 Jenis	- Jenis	0%	1 Paket	0 Paket	0%
I.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Jenis	46 Jenis	38 Jenis	32 Jenis	84%	1 Paket	1 Paket	100%
I.5.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Jenis	3 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100%	1 Paket	1 Paket	100%
I.5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	750 Eksplar	750 Eksplar	1000 Eksplar	1074 Eksplar	107%	12 Dokumen	6 Dokumen	50%
I.5.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Kali	n.a Kali	-	- Kali	0%	0 Laporan	0 Laporan	0%
I.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	34 Laporan	25 Laporan	23 Laporan	92%	40 Laporan	6 Laporan	15%
I.5.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang dikelola	1 Arsip	1 Arsip	-	- Arsip	0%	0 Arsip	0 Arsip	0%
I.5.8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	100%	12 Dokumen	6 Dokumen	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Juni tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
I.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	90 %	n.a %	0 %	0 %	0%	90 %	45 %	50%
I.6.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	- Paket	- Paket	0%	0 Paket	0 Paket	0%
I.6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	n.a Unit	- Unit	- Unit	0%	1 Unit	0 Unit	0%
I.6.3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	- Unit	- Unit	0%	1 Unit	1 Unit	100%
I.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	90 %	n.a %	90 %	90 %	100%	90 %	45 %	50%
I.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Jenis	2 Jenis	225 Jenis	89 Jenis	40%	12 Laporan	3 Laporan	25%
I.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Rekening	3 Rekening	4 Rekening	4 Rekening	100%	12 Laporan	6 Laporan	50%
I.7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan dan Kantor yang disediakan	2 Laporan	2 Laporan	n.a Laporan	n.a Laporan	0%	0 Laporan	0 Laporan	0%
I.7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	50%

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Juni tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
I.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	90 %	90 %	90 %	100%	90 %	90 %	45 %	50%
I.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%
I.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	12 Unit	12 Unit	12 Unit	100%	12 Unit	12 Unit	12 Unit	100%
I.8.3	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dikelola	5 Unit	n.a Unit	- Unit	0%	Unit	0 Unit	0 Unit	0%
I.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang direhabilitasi			1 Unit	100%	Unit	0 Unit	0 Unit	0%
I.8.5	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	10 Unit	20 Unit	100%	Unit	20 Unit	5 Unit	25%
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Nilai rata-rata Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) OPD	67.25 Nilai	82.48 Nilai	66.9 Nilai	87%	Nilai	67.25 Nilai	0 Nilai	0%
		Nilai rata-rata maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) OPD	3.05 Nilai	3.03 Nilai	3.03 Nilai	92%	Nilai	3.05 Nilai	0 Nilai	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Juni tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
II.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Hasil Pelaksanaan Pengawasan APIP yang selesai ditindaklanjuti	95 Laporan	90 Laporan	90 Laporan	72 Laporan	80%	95 Laporan	20 Laporan	21%
II.1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	4 Laporan	n.a Laporan	4 Laporan	3 Laporan	75%	4 Laporan	2 Laporan	50%
II.1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	8 Laporan	n.a Laporan	8 Laporan	8 Laporan	100%	8 Laporan	3 Laporan	38%
II.1.3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2 Laporan	n.a Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
II.1.4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	2 Laporan	n.a Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
II.1.5	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	2 Laporan	n.a Laporan	16 Laporan	16 Laporan	100%	2 Laporan	1 Laporan	50%
II.1.6	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Laporan	n.a Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0%	0 Laporan	0 Laporan	0%
II.1.7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	4 Laporan	1 Laporan	25%
II.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	26 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	100%	16 Laporan	4 Laporan	25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Juni tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
II.2.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	100%	10 Laporan	1 Laporan	10%
II.2.2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	16 Laporan	n.a Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0%	16 Laporan	3 Laporan	19%
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) 2. Jumlah Usulan Unit Kerja Zona Integritas	62.00 Nilai 4 Unit Kerja	52.06 Nilai 4 Unit Kerja	52.06 Nilai 4 Unit Kerja	52.06 Nilai 4 Unit Kerja	100%	62.00 Nilai 4 Unit Kerja	0 Nilai 0 Unit Kerja	0% 0%
III.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah kebijakan teknis yang dirumuskan	4 Dokumen	4 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0 Dokumen	0%
III.1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0 Dokumen	0%
III.1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0 Dokumen	0%
III.2	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah dokumen laporan hasil pendampingan dan asistensi yang tersusun	17 Laporan	17 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	18 Laporan	1 Laporan	6%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Juni tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
III.2.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	0%	0 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	0%
III.2.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	1 Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	10 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	0%
III.2.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100%	4 Kegiatan	1 Kegiatan	25%
III.2.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	100%	4 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	0%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Pangandaran

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Kinerja pelayanan yang disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pangandaran dapat lebih terarah yang secara administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang telah disesuaikan. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pangandaran akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan.

Capaian Kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Pangandaran berdasarkan indikator kinerja pada RPJMD Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3
Sasaran Strategi Inspektorat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	Nilai SAKIP	66,90 - 67,15	66,73	99,67%
	Tingkat Maturitas SPIP	3	2	66,67 %

Sumber : LKJIP Inspektorat Tahun 2021

2.2.1 Indikator Kinerja Nilai Sakip

Target Nilai Sakip pada tahun 2021 adalah 66,90 – 67,15. Berdasarkan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor: B/287/AA.05/2021 Tanggal 31 Maret 2021, pada tahun 2020 Kabupaten Pangandaran memperoleh nilai 66,73 atau berpredikat B (Baik). Dikarenakan pada tahun 2021 belum dilakukan evaluasi terhadap Sakip Kabupaten Pangandaran, maka digunakan nilai Sakip tahun 2020 sehingga capaian tahun 2021 untuk indikator ini yaitu 99,67%. Perhitungan capaian diperoleh dari rumus:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 = \frac{66,73}{66,95} \times 100 = 99,67\%$$

Tabel 2.4
Analisis Efektivitas Penggunaan Sumber Daya Tahun Anggaran 2021

Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Tingkat Efisiensi
Nilai Sakip	Nilai	99,67%	6.744.229.570	5.081.876.881	75,35	-

Indikator sasaran Nilai Sakip belum dapat dikatakan menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi anggaran untuk tahun anggaran 2021 Adapun tingkat capaian realisasi anggaran yaitu sebesar 75,35% berdasarkan perhitungan dari rumus:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Pagu Anggaran}} \times 100 \% = \frac{5.081.876.881}{6.744.229.570} \times 100 \% = 75,35\%$$

2.2.2 Indikator “Tingkat Maturitas SPIP”

Target tingkat maturitas SPIP pada tahun 2021 adalah level 3 (tiga). Tingkat Maturitas SPIP bersumber dari hasil Penilaian Baseline Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi oleh BPKP terhadap laporan hasil penilaian mandiri masing-masing Kabupaten/Kota/Provinsi dan Kementerian/Lembaga Negara. Tingkat kematangan Implementasi SPIP dimulai dari 0 sampai dengan 5, dinilai berdasarkan 3 (tiga) komponen penilaian yaitu :

1. Penetapan tujuan (bobot 40%);
2. Struktur dan proses (bobot 30%); dan
3. Pencapaian tujuan (bobot 30%)

dimana ketiga komponen tersebut terdiri dari beberapa unsur dan sub-unsur.

Berdasarkan hasil Penilaian dari BPKP bahwa tingkat maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Pangandaran berada pada level 2 (dua), sehingga pada Tahun 2021 capaiannya yaitu sebesar 66,67%. Kondisi tersebut diperoleh dari rumus:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \% = \frac{2}{3} \times 100 \% = 66,67 \%$$

Evaluasi atas tingkat maturitas SPIP dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali dengan level 1 s.d level 5. Sesuai dengan target RPJMD target kapabilitas APIP pada akhir periode RPJMD (Tahun 2021) adalah level 3 (tiga), sehingga capaian Tahun 2021 apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 66,67 % yang diperoleh dari rumus:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \% = \frac{2}{3} \times 100 \% = 66,67 \%$$

Tabel 2.5
Analisis Efektivitas Penggunaan Sumber Daya Tahun Anggaran 2021

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Tingkat Efisiensi
1	Tingkat Maturitas SPIP	Skor	66,67%	1.256.959.500	854.032.440	67,94	

Efektivitas dan efisiensi anggaran pada tahun 2021 belum menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi anggaran dikarenakan capaian kinerja tidak mencapai target. Tingkat capaian realisasi anggaran sebesar 67,94% berdasarkan perhitungan dari rumus:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Pagu Anggaran}} \times 100 \% = \frac{1.256.959.500}{854.032.440} \times 100 \% = 67,94\%$$

Pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Pangandaran dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat sebagai organisasi perangkat daerah dalam urusan Pemerintahan Unsur Pengawasan, disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat
Kabupaten Pangandaran

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Inspektorat				Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
1	Menurunnya rasio nilai temuan keuangan dari pengawasan pihak eksternal (BPK-Ri) terhadap total APBD	-	Persen	≤0,19	≤0,18	-	-	0,46	-	-	-		
2	Presentase SKPD yang tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP-nya berada pada level 3	-	Nilai	70	100	-	-	60	-	-	-		
3	Persentase SKPD yang nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)-nya sangat baik (BB)	-	Nilai	75	85	-	-	100	-	-	-		
4	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat		Nilai	BB	A	-	-	A	-	-	-		
5	Persentase unit kerja yang melakukan PMPRB Online dan Pembangunan ZI yang berpredikat WBK/WBBM	-	Persen	18.5	29.6	-	-	7.4	-	-	-		
6	Nilai Hasil Evaluasi Sakip Komponen Evaluasi Internal		Skor	-	-	7.60	7.80	-	-	-	-		
7	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat		Skor	-	-	90	90	-	-	-	-		
8	Tingkat Kapabilitas APIP		Nilai	-	-	Level 3	Level 3	-	-	-	-		
9	Presentase OPD yang mengimplementasikan Manajemen Risiko		Persen	-	-	23%	26%	-	-	-	-		
10	Presentase OPD yang membuat Kebijakan dan Pengendalian Korupsi		Persen	-	-	32	35	-	-	-	-		

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Pada pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat menghadapi isu penting sebagai berikut:

1. Terjadi temuan berulang di bidang fisik dan non fisik sarana prasarana;
2. Evaluasi implementasi SPIP belum dilaksanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan;
3. SKPD belum seluruhnya memahami terkait AKIP;
4. Belum Optimalnya komitmen dan integritas SDM dalam meningkatkan Nilai SAKIP;
5. Belum adanya komitmen dari tiap OPD terkait PMPRB Online;
6. Belum adanya komitmen dari tiap OPD terkait Zona Integritas berpredikat WBK dan WBBM.

2.3.1. Pelayanan Inspektorat

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran dan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Inspektorat. Inspektorat Kabupaten Pangandaran dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan perencanaan, perumusan, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengawasan administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan, sesuai dengan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi;
- b. Penyelenggaraan pengawasan dalam konteks pengawasan intern, yaitu seluruh proses kegiatan audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain, seperti konsultasi (consultancy), sosialisasi, asistensi, terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai (assurance) bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola/kepemerintahan yang baik (good governance);
- c. Pengkoordinasian, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas yang meliputi kesekretariatan, Inspektur Pembantu dan jabatan fungsional.
- d. Pengelolaan penggunaan anggaran dan penggunaan barang daerah, serta sumber daya aparatur Inspektorat Kabupaten;

- e. Penyelenggaraan koordinasi, kerjasama dalam rangka pelaksanaan pengawasan, pengusutan, pengujian dan penilaian administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan;
- f. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- g. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Inspektorat; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di atas maka kinerja pelayanan pada Inspektorat Kabupaten Pangandaran difokuskan pada pelayanan Pembinaan dan Pengawasan yang dapat meningkatkan Indikator Kinerja Nilai Sakip dan Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi.

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Beberapa permasalahan dan hambatan Inspektorat Kabupaten Pangandaran dalam penyelenggaraan tugas di bidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan desa melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan, ada beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat tersebut, yang timbul dari lingkungan internal dan eksternal, antara lain :

- a. Dari lingkungan internal terdiri dari :
 - Belum optimalnya jumlah aparatur pengawasan;
 - Belum optimalnya sarana dan prasarana pengawasan.
- b. Dari lingkungan eksternal yaitu masih kurangnya tanggapan auditan dalam menindak lanjuti rekomendasi hasil pengawasan dan masih kurang pahamiya terhadap UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Hambatan yang timbul dari lingkungan internal dan eksternal tersebut diharapkan bisa diminimalisasi guna menjalankan tugas pengawasan di tahun 2023.

2.3.3. Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021–2026, ditetapkan visi pembangunan Kabupaten Pangandaran yaitu ***“Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa”*** Dalam rangka pencapaian visi secara efektif dan efisien disusunlah misi Kabupaten Pangandaran, yaitu:

- MISI I Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Beriman Taqwa dan Mewujudkan Kerukunan Kehidupan Beragama

- MISI 2 Mengembangkan wisata dengan memperluas akses dan penataan berkelanjutan
- MISI 3 Mengembangkan aksesibilitas pendidikan sampai perguruan tinggi, dan peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan
- MISI 4 Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi local
- MISI 5 Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel
- MISI 6 Peningkatan pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan

Inspektorat Kabupaten Pangandaran, sebagai garda depan Urusan, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Unsur Pengawasan memberikan kemudahan dalam rangka mendukung misi ke-5 Kabupaten Pangandaran yaitu : Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel.

2.3.4. Tantangan dan Peluang Peningkatan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam meningkatkan pelayanan urusan/bidang , Inspektorat Kabupaten Pangandaran terdapat tantangan dan peluang. Adapun tantangan yang dihadapi antara lain:

1. Pandemi Covid-19 yang belum berakhir, menuntut semua pihak untuk melakukan penyesuaian dalam semua aspek, agar kegiatan tetap berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan;
2. Regulasi dan aturan yang mendorong diterapkannya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
3. Mulai diterapkannya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah.

Sedangkan peluang yang ada, antara lain:

1. Adanya komitmen bersama untuk mengefektifkan sistem pengawasan dan sistem akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan aparatur negara yang bersih dan bebas KKN;
2. Adanya dukungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor, P2UPD, Pusdiklat BPKP serta lembaga lain yang berkompeten dalam bidang pengawasan;

3. Adanya semangat Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk tahun-tahun berikutnya;
4. Dukungan regulasi berupa peraturan perundang-undangan yang memberikan penguatan terhadap fungsi pengawasan.

2.3.5. Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2023

Identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Untuk menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan harapan, maka strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan infrastruktur (sarana prasarana dan perangkat kebijakan/SOP pendukung kapabilitas pengawasan dan Meningkatkan Kompetensi dan sistem pengawasan intern pemerintah yang profesional;
2. Meningkatkan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023. Rancangan awal RKPD Inspektorat dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Urusan wajib Inspektorat terdiri dari 3 program, 12 kegiatan, dan 58 sub kegiatan, Urusan Pilihan Inspektorat terdiri dari 2 program, 4 kegiatan, dan 15 sub kegiatan. Serta 1 program, 8 Kegiatan, dan 43 sub kegiatan pendukung untuk kelancaran pelayanan administrasi perkantoran. Secara lebih jelas, rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan adanya rancangan awal RKPD yang disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 2.7
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023
Kabupaten Pangandaran

INSPEKTORAT

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				22,167,339,404	
	INSPEKTORAT DAERAH				15,233,010,090	INSPEKTORAT DAERAH				22,167,339,404	
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Nilai rata-rata Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) OPD	67.25	2,905,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Nilai rata-rata Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) OPD	69.25	9,645,744,800	
			Nilai rata-rata maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) OPD	3.05				Nilai rata-rata maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) OPD	3.10		
I.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Jumlah Hasil Pelaksanaan Pengawasan APIP yang selesai ditindaklanjuti	95 Laporan	1,965,000,000	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Jumlah Hasil Pelaksanaan Pengawasan APIP yang selesai ditindaklanjuti	100 Laporan	2,065,744,800	
I.1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	550,000,000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	4 Laporan	579,999,860	
I.1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	8 Laporan	350,000,000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	8 Laporan	367,500,000	
I.1.3	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Pangandaran	Jumlah Pelaksanaan Reviu kinerja Pemerintah Daerah	2 Laporan	85,000,000	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2 Laporan	89,250,000	
I.1.4	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Pangandaran	Jumlah Pelaksanaan Reviu keuangan Pemerintah Daerah	2 Laporan	60,000,000	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	2 Laporan	62,999,980	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I.1.5	Pengawasan Desa	Kab. Pangandaran	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Desa	2 Laporan	420,000,000	Pengawasan Desa	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	2 Laporan	441,000,000	
I.1.6	Kerjasama Pengawasan Internal	Kab. Pangandaran	Jumlah Pelaksanaan kerjasama pengawasan internal	1 Laporan	200,000,000	Kerjasama Pengawasan Internal	Kab. Pangandaran	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	209,995,000	
I.1.7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Pangandaran	Jumlah Pelaksanaan Monev TLHP BPK-RI dan APIP	12 Laporan	300,000,000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	12 Dokumen	314,999,960	
I.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	26 Laporan	940,000,000	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	26 Laporan	7,580,000,000	
I.2.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah penanganan penyelesaian kerugian Negara/Daerah	10 Laporan	350,000,000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	10 Laporan	370,000,000	
I.2.2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Pangandaran	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dengan tujuan tertentu	16 Laporan	500,000,000	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	16 Laporan	7,210,000,000	
	Dukungan untuk biaya operasional dalam rangka sinergitas terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan bantuan keuangan dari pemerintah daerah Provinsi Jawa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah desa				90,000,000						

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
II	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	62.00	1,465,341,686	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	65.00	1,543,508,700	
II.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Jumlah Usulan Unit Kerja Zona Integritas	4 Unit Kerja				Jumlah Usulan Unit Kerja Zona Integritas	4 Unit Kerja		
II.1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab. Pangandaran	Jumlah kebijakan teknis yang dirumuskan	4 Dokumen	12,000,000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Jumlah kebijakan teknis yang dirumuskan	4 Dokumen	20,000,000	
II.1.2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kab. Pangandaran	Jumlah kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang dirumuskan	2 Dokumen	6,000,000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab. Pangandaran	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	10,000,000	
II.2	Pendampingan dan Asistensi		Jumlah dokumen laporan hasil pendampingan dan asistensi yang tersusun	17 Laporan	1,453,341,686	Pendampingan dan Asistensi		Jumlah dokumen laporan hasil pendampingan dan asistensi yang tersusun	24 Laporan	1,523,508,700	
II.2.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	75,000,000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	3 Perangkat Daerah	76,250,000	
II.2.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Pangandaran	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	1 Laporan	185,000,000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Pangandaran	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10 Perangkat Daerah	194,250,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
II.2.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Pangandaran	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	12 Laporan	750,000,000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Pangandaran	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	12 Kegiatan	787,500,000	
II.2.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Pangandaran	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1 Laporan	443,341,686	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Pangandaran	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	4 Perangkat Daerah	465,508,700	
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	90 Persen	10,862,668,404	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	90 Persen	10,978,085,904	
			2. Persentase Laporan Keuangan dengan Kualitas Baik	90 Persen				2. Persentase Laporan Keuangan dengan Kualitas Baik	90 Persen		
			3. Persentase Peningkatan Kompetensi Aparatur	90 Persen				3. Persentase Peningkatan Kompetensi Aparatur	90 Persen		
			4. Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang berkualitas	90 Persen				4. Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang berkualitas	90 Persen		
III.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	90 Persen	226,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	90 Persen	237,299,750	
			2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	90 Persen				2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	90 Persen		
			3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	90 Persen				3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	90 Persen		
III.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	14 Dokumen	78,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen	81,900,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
III.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang dilaksanakan	12 Laporan	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10,500,000	
III.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang dilaksanakan	12 Laporan	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10,500,000	
III.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD yang dilaksanakan	12 Laporan	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10,500,000	
III.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD yang dilaksanakan	12 Laporan	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10,500,000	
III.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dilaksanakan	12 Laporan	100,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	104,999,750	
III.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah evaluasi yang dilaksanakan dan dilaporkan	4 Laporan	8,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	8,400,000	
III.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Unit Kerja yang Menyusun Laporan Kinerja Keuangan dengan baik	90 Persen	8,629,498,404	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Unit Kerja yang Menyusun Laporan Kinerja Keuangan dengan baik	90 Persen	8,913,963,789	
III.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pangandaran	Jumlah ASN yang mendapat fasilitas penyediaan gaji dan tunjangan	40 Orang	8,504,498,404	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pangandaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang	8,795,315,109	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
III.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	69 Dokumen	40,000,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	28 Dokumen	41,999,000		
III.2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah koordinasi SKPD yang dilaksanakan	12 Laporan	24,000,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	25,199,800		
III.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dilaksanakan	1 Dokumen	35,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	36,750,000		
III.2.5	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Pangandaran	Jumlah bahan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	4 Dokumen	12,000,000	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Pangandaran	Jumlah bahan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	0 Dokumen	0		
III.2.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	5 Dokumen	6,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	6,300,000		
III.2.7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Pangandaran	Jumlah laporan dan analisis prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	12 Laporan	8,000,000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	8,399,880		
iii.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	273 Unit	100,000,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	273 Unit	83,999,806		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
III.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	1 Laporan	6,000,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	6,300,000	
III.3.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pangandaran	Prosentase Barang Milik Daerah SKPD yang diamankan	100 Persen	20,000,000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Persen Doku men	20,999,956	
III.3.3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD yang dilaksanakan	12 Laporan	12,000,000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD yang dilaksanakan	0 Laporan	0	
III.3.4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilaksanakan	12 Laporan	8,000,000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Pembinaan, Pengawasan, dan Penilaian Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilaksanakan	0 Laporan	0	
III.3.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan	12 Laporan	6,000,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12,599,890	
III.3.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD yang dikelola	36 Unit 2	36,000,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	21 Laporan	6,300,000	
III.3.7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang digunakan	31 Unit 6	12,000,000	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang digunakan	0 Unit	37,799,960	
III.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	90 Persen	452,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	90 Persen	464,096,220	
III.4.1	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Pangandaran	Jumlah koordinasi pelaksanaan sistem informasi kepegawaian yang dilaksanakan	12 Laporan	30,000,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	31,496,400	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
III.4.2	Monitoring, dan Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Pangandaran	Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2	12,000,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2	12,599,820	
III.4.3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Pangandaran	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	31	350,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Pangandaran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40	420,000,000	
	Dukungan untuk pemberdayaan aparat pengawasan Inspektorat Kanupaten/Kota dalam rangka meningkatkan kompetensi, Kapabilitas, Keahlian, Keterampilan dan wawasan di bidang pengawasan				60,000,000						
III.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	90	526,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	90	481,929,985	
III.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pangandaran	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5	10,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	10,499,766	
III.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pangandaran	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	50	85,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	39,999,909	
III.5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Pangandaran	Jumlah jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	3	15,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	15,749,980	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
III.5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pangandaran	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	750 Eksplos	20,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	20,999,500	
III.5.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pangandaran	Jumlah kunjungan tamu	12 Kali	35,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	36,750,000	
III.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	40 Laporan	300,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	321,180,950	
III.5.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang dikelola	1 Arsip	26,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang dikelola	0 Arsip	0	
III.5.8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dilaksanakan	1 Sistem	35,000,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	36,749,880	
III.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	90 Persen	380,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	90% Persen	264,999,128	
III.6.1	Pengadaan Mebel	Kab. Pangandaran	Jumlah mebel yang diadakan	1 Paket	80,000,000	Pengadaan Mebel	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	25,000,000	
III.6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pangandaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	12 Unit	150,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pangandaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	79,999,128	
III.6.3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pangandaran	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	1 Unit	150,000,000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pangandaran	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	160,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
III.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	90 Persen	277,500,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	90 Persen	264,063,479	
III.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pangandaran	Jumlah jenis Jasa Surat Menyurat yang disediakan	2 Jenis	4,500,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4,720,000	
III.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pangandaran	Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	3 Rekening	72,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	75,598,000	
III.7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pangandaran	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Laporan	26,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pangandaran	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	0 Laporan	0	
III.7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pangandaran	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	5 Orang/ Bulan	175,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	183,745,479	
III.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	90 Persen	271,670,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	90 Persen	267,733,747	
III.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pangandaran	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1 Unit	45,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pangandaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	47,239,200	
III.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pangandaran	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	12 Unit	191,670,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pangandaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	194,244,547	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
III.8.3	Pemeliharaan Mebel	Kab. Pangandaran	Jumlah mebel yang dikelola	5 Unit	10,000,000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Pangandaran	Jumlah mebel yang dikelola	0 Unit	0	
III.8.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pangandaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dikelola	20 Unit	25,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pangandaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	26,250,000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Inspektorat Kabupaten Pangandaran sebagai unsur perencana pembangunan daerah melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat yaitu pelaksanaan Musrenbang secara berjenjang melalui Musrenbang Desa/Kelurahan, sampai Musrenbang Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Regional dan Nasional tetap melakukan upaya dalam rangka pelaksanaan pentahapan proses perencanaan pembangunan. Di dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut dilakukan pengkajian usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun dari SKPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada SKPD serta berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dan berdasarkan hasil pengamatan pelaksanaan Musrenbang kecamatan dengan tetap memperhatikan agenda prioritas pembangunan tahun 2023 yang tertuang di dalam RPJMD 2021 - 2026. Usulan dari pemangku kepentingan tersebut kemudian menjadi bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Usulan Program kegiatan masyarakat melalui Musrenbang mulai dari Musrenbang tingkat Kecamatan untuk tahun 2023 yang sesuai tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Pangandaran diakomodir dalam program dan kegiatan Rencana Kerja, sebagai berikut:

Tabel 2.8
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Pangandaran

INSPEKTORAT

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Nilai rata-rata Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) OPD	69.25	
			Nilai rata-rata maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) OPD	3.10	
I.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Jumlah Hasil Pelaksanaan Pengawasan APIP yang selesai ditindaklanjuti	100 Laporan	
I.1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	4 Laporan	
I.1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	8 Laporan	
I.1.3	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2 Laporan	
I.1.4	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	2 Laporan	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.1.5	Pengawasan Desa	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	2 Laporan	
I.1.6	Kerjasama Pengawasan Internal	Kab. Pangandaran	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	
I.1.7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	12 Dokumen	
I.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	26 Laporan	
I.2.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	10 Laporan	
I.2.2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	16 Laporan	
II	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	65.00 Nilai	
			Jumlah Usulan Unit Kerja Zona Integritas	4 Unit Kerja	
II.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Jumlah kebijakan teknis yang dirumuskan	4 Dokumen	
II.1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab. Pangandaran	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	
II.1.2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kab. Pangandaran	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	
II.2	Pendampingan dan Asistensi		Jumlah dokumen laporan hasil pendampingan dan asistensi yang tersusun	24 Laporan	
II.2.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	3 Perangkat Daerah	
II.2.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Pangandaran	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10 Perangkat Daerah	
II.2.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Pangandaran	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	12 Kegiatan	
II.2.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Pangandaran	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	4 Perangkat Daerah	
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	90 Persen	
			2. Persentase Laporan Keuangan dengan Kualitas Baik	90 Persen	
			3. Persentase Peningkatan Kompetensi Aparatur	90 Persen	
			4. Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang berkualitas	90 Persen	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
III.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	90 Persen	
			2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	90 Persen	
			3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	90 Persen	
III.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen	
III.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	
III.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	
III.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	
III.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	
III.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	
III.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	
III.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Unit Kerja yang Menyusun Laporan Kinerja Keuangan dengan baik	90 Persen	
III.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pangandaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang	
III.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	28 Dokumen	
III.2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	
III.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	
III.2.5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Pangandaran	Jumlah bahan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	0 Dokumen	
III.2.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	
III.2.7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
iii.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	273 Unit	
III.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	
III.3.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Persen Dokumen	
III.3.3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD yang dilaksanakan	0 Laporan	
III.3.4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilaksanakan	0 Laporan	
III.3.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	
III.3.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	21 Laporan	
III.3.7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang digunakan	0 Unit	
III.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	90 Persen	
III.4.1	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	
III.4.2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	
III.4.3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Pangandaran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	
III.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	90 Persen	
III.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	
III.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	
III.5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	
III.5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	
III.5.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	
III.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	
III.5.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang dikelola	0 Arsip	
III.5.8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
III.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	90% Persen	
III.6.1	Pengadaan Mebel	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	
III.6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pangandaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	
III.6.3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pangandaran	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	
III.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	90 Persen	
III.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	
III.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	
III.7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pangandaran	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	0 Laporan	
III.7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	
III.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	90 Persen	
III.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pangandaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	
III.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pangandaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	
III.8.3	Pemeliharaan Mebel	Kab. Pangandaran	Jumlah mebel yang dikelola	0 Unit	
III.8.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pangandaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit Unit	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT KABUPATEN PANGANDARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

RPJMN 2020-2024 merupakan periode IV dari Pembangunan Jangka Panjang Nasional untuk mewujudkan visi **“Indonesia 2045 Berdaulat, Adil, Makmur”**. Arah kebijakan RPJMN dalam periode ini merupakan tahapan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, sesuai dengan tema RPJMN IV **“Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur, melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung SDM berkualitas dan berdaya saing”**. Dalam rancangan teknokratik, RPJMN 2020-2024 dijabarkan dalam 7 agenda pembangunan yaitu (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; (7) memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

RPJMN 2020-2024 menargetkan Indikator pada setiap dinas. Target RPJMN ini menghadapi tantangan global yang belum kondusif, merupakan dampak dari bencana virus corona (Covid-19) pada awal Tahun 2020.

Dalam Penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 mengacu pada kebijakan Nasional, Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangaunan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Berpedoman pada hasil penyalarsan/sinkronisasi prioritas pembangunan Pusat dan Provinsi Jawa Barat serta memperhatikan saran dan masukan dari peserta Forum Konsultasi Publik, maka prioritas pembangunan yang diprioritaskan sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3. 1
Korelasi Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Pangandaran

No	Prioritas Nasional	Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Pangandaran
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah	Kolaborasi membangun desa
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan, dan Menjamin Pemerataan;	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	Pengembangan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah
3	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing;	Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan	Optimalisasi pengelolaan potensi pariwisata
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;	Reformasi Sistem Perlindungan Sosial	Optimalisasi sektor ekonomi unggulan, UMKM, IKM, Koperasi dan kualitas tenaga kerja
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;	Reformasi Sistem Pendidikan Dan Pemajuan Kebudayaan	Reformasi Sistem Kesehatan daerah, sistem perlindungan sosial dan tata kelola pendidikan, keagamaan, kepemudaan dan olahraga
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;	Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Optimalisasi tata kelola pemerintahan, sumber pendanaan pembangunan dan pelayanan public
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan penataan Daerah	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana
8		Gerakan membangun Desa	
9		Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara	
10		Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
11		Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat

Dalam Mendukung visi dan misi Bupati Kabupaten Pangandaran, tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Tahun 2023 mengacu kepada misi yang terkait dengan urusan Pemerintahan Unsur Pengawasan masuk pada misi ke-5 yaitu, Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Akuntabel Sedangkan, Tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Pangandaran berdasarkan Misi ke-5 Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Inspektorat Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula Hitung	Satuan	Target Tahun 2023
Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) Indikator : 1. Nilai SAKIP 2. Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Nilai Hasil Evaluasi Sakip Komponen Evaluasi Internal	Nilai Hasil Evaluasi Sakip Komponen Evaluasi Internal	Nilai	7,80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat	Nilai	71,50
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan SPIP	Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi	Nilai <i>Quality Assurance</i> Maturitas Penyelenggaraan SPIP dari BPKP	Level	3

3.3. Program dan Kegiatan

Inspektorat Kabupaten Pangandaran dalam mengimplimentasikan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik menyusun program dan kegiatan untuk tahun 2023 serta merupakan perwujudan dari upaya untuk mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran. Program dan kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Pangandaran pada tahun 2023 berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah telah menetapkan 3 program, yaitu (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (2) Program Penyelenggaraan Pengawasan, dan (3) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Inspektorat secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Pangandaran
INSPEKTORAT

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
	INSPEKTORAT DAERAH								
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Nilai rata-rata Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) OPD		67.25	22,167,339,404			76.5	16,147,915,755
		Nilai rata-rata maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) OPD		3.05	9,645,744,800			3.10	3,118,250,000
I.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Hasil Pelaksanaan Pengawasan APIP yang selesai ditindaklanjuti		95	2,065,744,800			100 Laporan	2,188,250,000
I.1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab Pangandaran	4 Laporan	579,999,860	APBD Kabupaten		4 Laporan	610,000,000
I.1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab Pangandaran	8 Laporan	367,500,000	APBD Kabupaten		8 Laporan	400,000,000
I.1.3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Kab Pangandaran	2 Laporan	89,250,000	APBD Kabupaten		2 Laporan	95,000,000
I.1.4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Kab Pangandaran	2 Laporan	62,999,980	APBD Kabupaten		2 Laporan	67,000,000
I.1.5	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Kab Pangandaran	2 Laporan	441,000,000	APBD Kabupaten		2 Laporan	465,000,000
I.1.6	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kab Pangandaran	1 Kesepakatan	209,995,000	APBD Kabupaten		1 Kesepakatan	220,500,000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
I.1.7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab Pangandaran	12 Dokumen	314,999,960	APBD Kabupaten		12 Dokumen	330,750,000
I.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		26	7,580,000,000			26 Laporan	930,000,000
I.2.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Kab Pangandaran	10 Laporan	370,000,000	APBD Kabupaten		10 Laporan	390,000,000
I.2.2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab Pangandaran	16 Laporan	7,210,000,000	APBD Kabupaten		16 Laporan	540,000,000
II	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)		62.00	1,543,508,700			65.00	1,592,000,000
		Jumlah Usulan Unit Kerja Zona Integritas		4 Unit Kerja				4 Unit Kerja	
II.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah kebijakan teknis yang dirumuskan		4 Dokumen	20,000,000			4 Dokumen	30,000,000
II.1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Kab Pangandaran	2 Rekomendasi	10,000,000	APBD Kabupaten		2 Rekomendasi	15,000,000
II.1.2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Kab Pangandaran	2 Rekomendasi	10,000,000	APBD Kabupaten		2 Rekomendasi	15,000,000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
II.2	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah dokumen laporan hasil pendampingan dan asistensi yang tersusun		17 Laporan	1,523,508,700			17 Laporan	1,562,000,000
II.2.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Pangandaran	3 Perangkat Daerah	76,250,000	APBD Kabupaten		3 Perangkat Daerah	82,000,000
II.2.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab Pangandaran	10 Perangkat Daerah	194,250,000	APBD Kabupaten		1 Perangkat Daerah	200,000,000
II.2.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab Pangandaran	12 Kegiatan	787,500,000	APBD Kabupaten		12 Kegiatan	800,000,000
II.2.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab Pangandaran	4 Perangkat Daerah	465,508,700	APBD Kabupaten		1 Perangkat Daerah	480,000,000
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi		90%	10,978,085,904			92%	11,437,665,755
		2. Persentase Laporan Keuangan dengan Kualitas Baik		90%				92%	
		3. Persentase Peningkatan Kompetensi Aparatur		90%				92%	
		4. Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang berkualitas		90%				92%	
III.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu		90%	237,299,750			92%	252,500,000
		2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu		90%				92%	
		3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu		90%				92%	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
III.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Pangandaran	14 Dokumen	81,900,000	APBD Kabupaten		14 Dokumen	90,000,000
III.1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab Pangandaran	1 Dokumen	10,500,000	APBD Kabupaten		12 Dokumen	11,000,000
III.1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab Pangandaran	1 Dokumen	10,500,000	APBD Kabupaten		12 Dokumen	11,000,000
III.1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab Pangandaran	1 Dokumen	10,500,000	APBD Kabupaten		12 Dokumen	11,000,000
III.1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab Pangandaran	1 Dokumen	10,500,000	APBD Kabupaten		12 Dokumen	11,000,000
III.1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab Pangandaran	3 Laporan	104,999,750	APBD Kabupaten		12 Laporan	110,000,000
III.1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Pangandaran	4 Laporan	8,400,000	APBD Kabupaten		4 Laporan	8,500,000
III.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja yang Menyusun Laporan Kinerja Keuangan dengan baik		90%	8,913,963,789			92%	9,232,289,937
III.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Pangandaran	40 Orang	8,795,315,109	APBD Kabupaten		45 Orang	9,105,189,937

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
III.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab Pangandaran	69 Dokumen	41,999,000	APBD Kabupaten		69 Dokumen	50,000,000
III.2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab Pangandaran	12 Dokumen	25,199,800	APBD Kabupaten		12 Dokumen	25,200,000
III.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab Pangandaran	1 Laporan	36,750,000	APBD Kabupaten		1 Laporan	37,000,000
III.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab Pangandaran	5 Laporan	6,300,000	APBD Kabupaten		5 Laporan	6,500,000
III.2.6	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab Pangandaran	12 Dokumen	8,399,880	APBD Kabupaten		12 Dokumen	8,400,000
III.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik		273 Unit	83,999,806			273 Unit	75,400,000
III.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab Pangandaran	1 Dokumen	6,300,000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	6,500,000
III.3.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab Pangandaran	1 Dokumen	20,999,956	APBD Kabupaten			
III.3.3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab Pangandaran	12 Laporan	12,599,890	APBD Kabupaten		12 Laporan	12,600,000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
III.3.4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab Pangandaran	12 Laporan	6,300,000	APBD Kabupaten		12 Laporan	6,300,000
III.3.5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab Pangandaran	12 Laporan	37,799,960	APBD Kabupaten		12 Laporan	50,000,000
III.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik		90%	464,096,220			92%	477,600,000
III.4.1	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab Pangandaran	12 Laporan	31,496,400	APBD Kabupaten		12 Laporan	45,000,000
III.4.2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab Pangandaran	2 Dokumen	12,599,820	APBD Kabupaten		2 Dokumen	12,600,000
III.4.3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab Pangandaran	31 Orang	420,000,000	APBD Kabupaten		31 Orang	420,000,000
III.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik		90	481,929,985			82%	518,000,000
III.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab Pangandaran	1 Paket	10,499,766	APBD Kabupaten		5 Paket	11,000,000
III.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab Pangandaran	50 Paket	39,999,909	APBD Kabupaten		50 Paket	45,000,000
III.5.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab Pangandaran	3 Paket	15,749,980	APBD Kabupaten		3 Paket	16,000,000
III.5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab Pangandaran	750 Dokumen	20,999,500	APBD Kabupaten		750 Dokumen	21,000,000
III.5.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab Pangandaran	12 Laporan	36,750,000	APBD Kabupaten		12 Laporan	40,000,000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
III.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Pangandaran	40 Laporan	321,180,950	APBD Kabupaten		50 Laporan	340,000,000
III.5.7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab Pangandaran	12 Dokumen	36,749,880	APBD Kabupaten		1 Dokumen	45,000,000
III.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi		90%	264,999,128			92%	306,075,819
III.6.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab Pangandaran	1 Paket	25,000,000	APBD Kabupaten			
III.6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab Pangandaran	7 Unit	79,999,128	APBD Kabupaten		10 Unit	131,075,819
III.6.3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab Pangandaran	1 Unit	160,000,000	APBD Kabupaten		1 Unit	175,000,000
III.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan		90	264,063,479			100%	300,800,000
III.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Pangandaran	12 Laporan	4,720,000	APBD Kabupaten		12 Laporan	4,800,000
III.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab Pangandaran	12 Laporan	75,598,000	APBD Kabupaten		12 Laporan	76,000,000
III.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab Pangandaran	12 Laporan	183,745,479	APBD Kabupaten		12 Laporan	220,000,000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
III.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi		90%	267,733,747			92%	275,000,000
III.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab Pangandaran	1 Unit	47,239,200	APBD Kabupaten		1 Unit	50,000,000
III.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab Pangandaran	12 Unit	194,244,547	APBD Kabupaten		12 Unit	195,000,000
III.8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab Pangandaran	20 Unit	26,250,000	APBD Kabupaten		20 Unit	30,000,000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT
KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2023

Rencana kerja program/kegiatan dan Sumber Pendanaan Inspektorat Kabupaten Pangandaran merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Inspektorat kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Inspektorat. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat. Berikut merupakan tabel yang menggambarkan rencana kerja dan pendanaan Inspektorat pada tahun 2023 dan telah dijabarkan pula ke dalam target dan pagu indikatif per triwulan:

Tabel 4. 1
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Renja 2023	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4		5		6		7		8	
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			3,716,385,603		3,744,571,268		4,513,615,266		10,192,767,266		22,167,339,404
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Nilai rata-rata Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) OPD	0	430,249,955	0	879,124,935	0	991,119,955	67.25	7,345,249,955	67.25	9,645,744,800
		Nilai rata-rata maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) OPD	0		0		0		3.05		3.05	
I.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Hasil Pelaksanaan Pengawasan APIP yang selesai ditindaklanjuti	15 Laporan	360,249,955	45 Laporan	599,124,935	65 Laporan	746,119,955	95 Laporan	360,249,955	95 Laporan	2,065,744,800
I.1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan	144,999,965	1 Laporan	144,999,965	1 Laporan	144,999,965	1 Laporan	144,999,965	4 Laporan	579,999,860
I.1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Laporan	91,875,000	2 Laporan	91,875,000	2 Laporan	91,875,000	2 Laporan	91,875,000	8 Laporan	367,500,000
I.1.3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan	44,625,000	-	-	-	-	1 Laporan	44,625,000	2 Laporan	89,250,000
I.1.4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	-	-	2 Laporan	62,999,980	-	-	-	-	2 Laporan	62,999,980
I.1.5	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	-	-	1 Laporan	220,500,000	2 Laporan	220,500,000	-	-	2 Laporan	441,000,000
I.1.6	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	-	-	-	-	1 Kesepakatan	209,995,000	-	-	1 Kesepakatan	209,995,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Renja 2023	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif
I.1.7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	3 Laporan	78,749,990	3 Laporan	78,749,990	3 Laporan	78,749,990	3 Laporan	78,749,990	12 Dokumen	314,999,960
I.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	2 Laporan	70,000,000	10 Laporan	280,000,000	20 Laporan	245,000,000	26 Laporan	6,985,000,000	26 Laporan	7,580,000,000
I.2.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani	1 Laporan	35,000,000	3 Laporan	105,000,000	2 Laporan	70,000,000	4 Laporan	160,000,000	10 Laporan	370,000,000
I.2.2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1 Laporan	35,000,000	5 Laporan	175,000,000	5 Laporan	175,000,000	5 Laporan	6,825,000,000	16 Laporan	7,210,000,000
II	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	0	360,000,000	0	226,250,000	0	809,758,700	62 Nilai	147,500,000	62 Nilai	1,543,508,700
		Jumlah Usulan Unit Kerja Zona Integritas	0		0		0		4 Unit Kerja		4 Unit Kerja	
II.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah kebijakan teknis yang dirumuskan	2 Rekomendasi	10,000,000	0	0	0	0	2 Rekomendasi	10,000,000	4 Dokumen	20,000,000
II.1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	-	-	-	-	-	-	2 Rekomendasi	10,000,000	2 Rekomendasi	10,000,000
II.1.2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	10,000,000	-	-	-	-	-	-	2 Rekomendasi	10,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Renja 2023	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif
II.2	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah dokumen laporan hasil pendampingan dan asistensi yang tersusun	3 Laporan	350,000,000	6 Laporan	226,250,000	17 Laporan	809,758,700	3 Laporan	137,500,000	29 Laporan	1,523,508,700
II.2.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3 Perangkat Daerah	76,250,000	-	-	-	-	3 Perangkat Daerah	76,250,000
II.2.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	-	-	-	-	10 Perangkat Daerah	194,250,000	-	-	10 Perangkat Daerah	194,250,000
II.2.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3 Kegiatan	350,000,000	3 Kegiatan	150,000,000	3 Kegiatan	150,000,000	3 Kegiatan	137,500,000	12 Kegiatan	787,500,000
II.2.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	-	-	-	-	4 Perangkat Daerah	465,508,700	-	-	4 Perangkat Daerah	465,508,700
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase Laporan Keuangan dengan Kualitas Baik 3. Persentase Peningkatan Kompetensi Aparatur 4. Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang berkualitas	22.50%	2,926,135,648	22.50%	2,639,196,333	22.50%	2,712,736,611	22.50%	2,700,017,311	90%	10,978,085,904
			22.50%		22.50%		22.50%		22.50%		90%	
			22.50%		22.50%		22.50%		22.50%		90%	
			22.50%		22.50%		22.50%		22.50%		90%	

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Renja 2023	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif
III.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	22.50%	31,200,000	22.50%	20,800,000	22.50%	82,100,000	22.50%	103,199,750	90%	237,299,750
		2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	22.50%		22.50%				22.50%		90%	
		3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	22.50%		22.50%				22.50%		90%	
III.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	14,100,000	3 Dokumen	18,700,000	5 Dokumen	25,000,000	3 Dokumen	24,100,000	14 Dokumen	81,900,000
III.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							1 Dokumen	10,500,000	1 Dokumen	10,500,000
III.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							1 Dokumen	10,500,000	1 Dokumen	10,500,000
III.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD							1 Dokumen	10,500,000	1 Dokumen	10,500,000
III.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD							1 Dokumen	10,500,000	1 Dokumen	10,500,000

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Renja 2023	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif
III.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	15,000,000	-	-	1 Laporan	55,000,000	1 Laporan	34,999,750	3 Laporan	104,999,750
III.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2,100,000	1 Laporan	2,100,000	1 Laporan	2,100,000	1 Laporan	2,100,000	4 Laporan	8,400,000
III.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja yang Menyusun Laporan Kinerja Keuangan dengan baik	22.50%	2,255,738,447	22.50%	2,220,248,447	22.50%	2,218,988,447	22.50%	2,218,988,447	90%	8,913,963,789
III.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang	2,198,828,777	40 Orang	2,198,828,777	40 Orang	2,198,828,777	40 Orang	2,198,828,777	40 Orang	8,795,315,109
III.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dokumen	10,499,750	20 Dokumen	10,499,750	25 Dokumen	10,499,750	18 Dokumen	10,499,750	69 Dokumen	41,999,000
III.2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 Dokumen	6,299,950	3 Dokumen	6,299,950	3 Dokumen	6,299,950	3 Dokumen	6,299,950	12 Dokumen	25,199,800
III.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	36,750,000	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	36,750,000
III.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1,260,000	2 Laporan	2,520,000	1 Laporan	1,260,000	1 Laporan	1,260,000	5 Laporan	6,300,000

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Renja 2023	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif
III.2.6	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3 Laporan	2,099,970	3 Laporan	2,099,970	3 Laporan	2,099,970	3 Laporan	2,099,970	12 Dokumen	8,399,880
III.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	273 Unit	20,474,963	273 Unit	35,174,919	273 Unit	14,174,963	273 Unit	14,174,963	273 Unit	83,999,806
III.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	6,300,000	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	6,300,000
III.3.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	1 Dokumen	20,999,956	-	-	-	-	1 Dokumen	20,999,956
III.3.3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	3 Laporan	3,149,973	3 Laporan	3,149,973	3 Laporan	3,149,973	3 Laporan	3,149,973	12 Laporan	12,599,890
III.3.4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	1,575,000	3 Laporan	1,575,000	3 Laporan	1,575,000	3 Laporan	1,575,000	12 Laporan	6,300,000
III.3.5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	9,449,990	3 Laporan	9,449,990	3 Laporan	9,449,990	3 Laporan	9,449,990	12 Laporan	37,799,960
III.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	22.50%	116,024,055	22.50%	116,024,055	22.50%	116,024,055	22.50%	116,024,055	90%	464,096,220
III.4.1	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen	7,874,100	3 Dokumen	7,874,100	3 Dokumen	7,874,100	3 Dokumen	7,874,100	12 Dokumen	31,496,400

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Renja 2023	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif
III.4.2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen	3,149,955	3 Dokumen	3,149,955	3 Dokumen	3,149,955	3 Dokumen	3,149,955	12 Dokumen	12,599,820
III.4.3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	105,000,000	8 Orang	105,000,000	8 Orang	105,000,000	7 Orang	105,000,000	31 Orang	420,000,000
III.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	22.50%	107,562,249	22.50%	113,062,106	22.50%	147,562,340	22.50%	113,743,290	90	481,929,985
III.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	1 Paket	10,499,766	-	-	-	-	1 Paket	10,499,766
III.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	39,999,909	-	-	-	-	-	-	50 Paket	39,999,909
III.5.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3,937,495	3 Paket	3,937,495	3 Paket	3,937,495	3 Paket	3,937,495	3 Paket	15,749,980
III.5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	185 Dokumen	5,249,875	185 Dokumen	5,249,875	190 Dokumen	5,249,875	190 Dokumen	5,249,875	750 Dokumen	20,999,500
III.5.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	9,187,500	3 Laporan	9,187,500	3 Laporan	9,187,500	3 Laporan	9,187,500	12 Laporan	36,750,000
III.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	40,000,000	10 Laporan	75,000,000	14 Laporan	120,000,000	10 Laporan	86,180,950	40 Laporan	321,180,950

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Renja 2023	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif
III.5.7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	9,187,470	3 Dokumen	9,187,470	3 Dokumen	9,187,470	3 Dokumen	9,187,470	12 Dokumen	36,749,880
III.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	22.50%	264,999,128	22.50%	0	22.50%	0	22.50%	0	90%	264,999,128
III.6.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	25,000,000	-	-	-	-	-	-	1 Paket	25,000,000
III.6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	79,999,128	-	-	-	-	-	-	7 Unit	79,999,128
III.6.3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	160,000,000	-	-	-	-	-	-	1 Unit	160,000,000
III.7	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	22.50%	66,015,870	22.50%	66,015,870	22.50%	66,015,870	22.50%	66,015,870	90	264,063,479
III.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	1,180,000	3 Laporan	1,180,000	3 Laporan	1,180,000	3 Laporan	1,180,000	12 Laporan	4,720,000
III.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	18,899,500	3 Laporan	18,899,500	3 Laporan	18,899,500	3 Laporan	18,899,500	12 Laporan	75,598,000
III.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	45,936,370	3 Laporan	45,936,370	3 Laporan	45,936,370	3 Laporan	45,936,370	12 Laporan	183,745,479
III.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	22.50%	64,120,937	22.50%	67,870,937	22.50%	67,870,937	22.50%	67,870,937	90%	267,733,747

Kode	Usuran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Renja 2023	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif
III.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	11,809,800	1 Unit	11,809,800	1 Unit	11,809,800	1 Unit	11,809,800	1 Unit	47,239,200
III.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	48,561,137	12 Unit	48,561,137	12 Unit	48,561,137	12 Unit	48,561,137	12 Unit	194,244,547
III.8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	3,750,000	10 Unit	7,500,000	10 Unit	7,500,000	10 Unit	7,500,000	35 Unit	26,250,000

BAB V

PENUTUP

Renja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun anggaran dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah. Di samping itu Renja juga berfungsi untuk meninjau kembali hasil capaian kinerja Perangkat Daerah di tahun sebelumnya. Renja Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 ini disusun berdasarkan Renstra Inspektorat Kabupaten Pangandaran tahun 2021 - 2026 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran tahun 2023.

Penyusunan Renja Inspektorat sebagai upaya mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran. Pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis, baik dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran maupun di Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Komitmen dan dukungan dari seluruh ASN di lingkungan Inspektorat sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin terlaksananya rencana program dan kegiatan yang disusun di dalam Renja Tahun 2023 ini serta dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan peningkatan Nilai Sakip dan Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi di Kabupaten Pangandaran.

Parigi, 25 Juli 2022


INSPEKTUR
KABUPATEN PANGANDARAN

Drs. APIP WINAYADI
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19650514 199203 1 007